

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menunjang untuk memberi kemudahan pada penggunaanya. Keberadaan teknologi informasi sangat di butuhkan, hampir seluruh perusahaan atau instansi baik pemerintahan maupun swasta di Indonesia telah memiliki teknologi yang canggih dalam pengolahan data. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu komponen peningkatan mutu bagi penggunaanya. Karena dengan pemanfaatan teknologi informasi khususnya sistem informasi dapat membantu dan mempermudah berbagai bidang pekerjaan yang terkait dengan kemudahan akses, jarak dan waktu. Instansi pemerintahan maupun lembaga-lembaga lain tidak terlepas juga dalam pengguna yang memanfaatkan kecanggihan teknologi atau sistem tersebut (Aang Suvandi et al., 2022).

Teknologi informasi adalah factor yang sangat mendukung dalam penerapan sistem informasi dan merupakan suatu Solusi instansi dan manajemen untuk memecahkan permasalahan manajemen dan akuntansi yang timbul dalam praktiknya. Keberasaan sistem informasi mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktivitas bagi berbagai instansi, baik instansi pemerintahan negeri, swasta maupun perorangan atau individual, serta mendorong perwujudan penduduk maju dan Sejahtera (Sopiandi, 2020).

Kegiatan dalam pendataan penduduk pada dasarnya telah diatur didalam UU Nomor 23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan. Didalam administrasi kependudukan tersebut diantaranya bertujuan untuk menata, menertibkan dokumen, dan data kependudukan. Oleh karena hal tersebut, setiap desa perlu memiliki data penduduk yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan dalam melakukan pelayanan, pembangunan dan sektor lainnya (P & Yuliana, 2021).

Pengembangan teknologi yang sangat cepat mengharuskan instansi mengikuti perkembangan tersebut, oleh karena itu suatu instansi membutuhkan sistem informasi yang dapat mendukung kebutuhannya dalam mencapai efisiensi dan efektifitas kerja demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan suatu sistem informasi data kependudukan maka diharapkan pengelolaan data akan lebih mudah dan efisien (Metra, 2023).

Kemajuan teknologi ini juga yang mendorong instansi pemerintahan seperti Kantor Wali Nagari Muara Kiawai untuk mengikuti perkembangan teknologi yang dapat memudahkan dan mendukung instansi pemerintahan menciptakan efisiensi kerja dalam pengolahan data kependudukan.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Wali Nagari Muara Kiawai, yaitu pemekaran daerah yang belum lama terjadi di Nagari Muara Kiawai mengharuskan pihak Kantor Wali Nagari Muara Kiawai untuk melakukan pendataan ulang terkait data masyarakat yang telah dipisah berdasarkan pembagian pemekaran daerah. Saat ini data penduduk Nagari Muara Kiawai masih menjadi satu dengan data penduduk dari Kenagarian lain, sehingga pengolahan data kependudukannya belum berjalan secara maksimal. Apalagi belum terkomputerisasinya pengolahan data membuat data penduduk tidak diolah dengan baik, seperti kurang maksimal penyimpanan data kependudukan.

Berkaitan dengan adanya masalah kependudukan yang terjadi, pihak yang bertugas dalam penyelenggaran pendataan penduduk pada Kantor Wali Nagari Muara Kiawai berusaha memperoleh data kependudukan yang akurat untuk pembuatan pemetaan yang tepat, guna menanggulangi masalah kependudukan tersebut.

Untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam melakukan pengumpulan, pengolahan data penduduk yang berbasis teknologi informasi, maka penulis berencana membuat sebuah sistem informasi pendataan penduduk. Berdasarkan

uraian diatas maka penulis tertarik untuk menerapkan bahasa pemrograman *PHP* dan menggunakan *MySql* sebagai *software* dalam menyimpan data, melakukan pengolahan data tersebut dan menyusunnya dalam bentuk skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan beberapa pokok permasalahan yang ada pada Kantor Wali Nagari Muara Kiawai sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem informasi pendataan penduduk berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan *MySQL* sebagai *database*-nya?
2. Bagaimana menerapkan atau mengimplementasikan sistem informasi pendataan penduduk berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan *MySQL* agar seluruh pendataan dapat dilakukan secara efektif, akurat, dan efisien?

1.3 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan atau perkiraan yang dirumuskan untuk mencari solusi terhadap masalah yang sedang diteliti (Tampubolon, 2023). Berdasarkan rumusan masalah yang penulis uraikan sebelumnya, penulis dapat mengajukan hipotesa sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada, hipotesa yang diajukan tidak hanya sekedar jawaban sementara, tetapi juga menjadi landasan bagi analisis yang mendalam untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih akurat mengenai permasalahan yang diteliti. maka dapat dikemukakan beberapa hipotesa sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang ada, yaitu :

1. Diharapkan dengan adanya sistem informasi pendataan penduduk berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan *MySql* dapat mempermudah pihak Kantor Wali Nagari Muara Kiawai dalam melakukan pendataan penduduk.

2. Diharapkan dengan mengimplementasikan sistem informasi pendataan penduduk berbasis web ini dapat meningkatkan akurasi data penduduk dibandingkan dengan penulisan manual.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian skripsi ini terarah dan tujuan dari penulis ini tercapai sesuai yang diharapkan, maka penulis menetapkan batasan masalah hanya pada pembuatan aplikasi sistem informasi pendataan penduduk pada kantor wali nagari Muara kiawai. Dengan membuat sebuah sistem informasi pendataan penduduk berbasis website yang memiliki manfaat untuk membantu serta mempermudah Kantor Wali Nagari Muara Kiawai dalam mengelola data penduduk agar dapat dilakukan dengan akurat, cepat, dan lengkap. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Perancangan dan pembangunan sistem informasi penduduk berbasis web ini hanya mencatat data penduduk yang mencakup informasi umum seperti nama, NIK, nomor Kartu Keluarga, Jenis kelamin, umur, dan pekerjaan. Data tambahan yang lebih terinci seperti penghasilan, riwayat kesehatan atau kepemilikan asset tidak termasuk dalam sistem yang dibangun. Sistem berbasis website ini juga hanya mencakup data asset nagari secara umum, informasi detail terkait kondisi asset tidak termasuk dalam sistem.
2. Sistem informasi pendataan penduduk berbasis web yang dirancang hanya dapat diakses oleh kaum yang berwenang yaitu, Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, dan Wali Nagari. Penduduk umum tidak dapat mengakses atau mengedit data mereka sendiri secara langsung.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topic yang diangkat. Penelitian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman dan pengambilan keputusan dalam bidang yang diteliti. Pada penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Merancang sistem informasi pendataan penduduk berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan database *MySQL*.
2. Menerapkan atau mengimplementasikan sistem informasi pendataan penduduk dengan menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan database *MySQL* agar kegiatan pendataan penduduk dapat dilakukan secara efektif, akurat, dan efisien.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi Kantor Wali Nagari Muara Kiawai. adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya sistem informasi pendataan penduduk berbasis web, proses pendataan penduduk yang sebelumnya dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang tidak terintegrasi, dapat dilakukan dengan lebih efisien.
2. Dengan penerapan sistem yang lebih terorganisir, petugas administrasi dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan tepat kepada masyarakat. Seperti, permintaan data penduduk atau laporan demografi dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat, sehingga meningkatkan kepuasan warga dan efektifitas pelayanan public.

1.7 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Wali Nagari Muara Kiawai merupakan sebuah instansi pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang diantaranya: menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan nagari membina kemasyarakatan nagari, memberdayakan masyarakat nagari, mengelola keuangan dan asset nagari, serta membina kehidupan

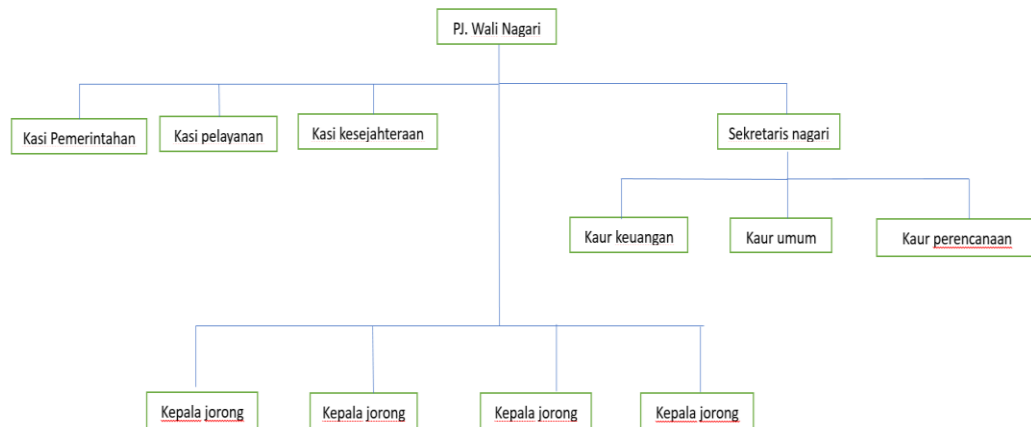
masyarakat di Nagari Muara Kiawai. Kantor Wali Nagari ini terletak di Nagari Muara Kiawai, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

1.7.1 Sejarah Kantor Wali Nagari Muaro Kiawai

Kantor wali nagari merupakan institusi pemerintahan di tingkat negri (desa), yang ada di Sumatera Barat. Dalam konteks sejarahnya, kantor Wali Nagari memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan Tradisional yang dikenal dengan istilah “Nagari” atau desa adat. Dahulunya Nagari Muara Kiawai belum dinamakan dengan istilah Nagari, tetapi dengan sebutan Desa Muara Kiawai dimana wilayah cakupannya yang kecil. Namun pada tahun 2001 Desa Muara Kiawai ini mengalami penambahan wilayah dengan cakupan yang lebih besar dari sebuah desa biasa. Maka dibentuklah sebuah Nagari dengan nama Nagari Muara Kiawai, dan dibangunnya kantor wali Nagari Muara Kiawai dengan dipimpin oleh seorang wali nagari yang bertugas mengatur urusan pemerintahan, adat, dan sosial di Wilayah Nagari Muara Kiawai.

1.7.2 Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Muaro Kiawai

Struktur organisasi merupakan gambaran formal organisasi yang menunjukkan adanya pemisahan fungsi, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang disusun untuk membantu pencapaian hasil usaha sebuah instansi pemerintah serta pengendaliannya secara efektifitas. Struktur organisasi pada kantor wali Nagari Muara Kiawai dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



(Sumber: Kantor Wali Nagari Nagari Muaro Kiawai)

Gambar 1. 1 Struktur Kantor Wali Nagari Muaro Kiawai

1.7.3 Tugas dan Wewenang Petugas

Berdasarkan dari gambar 1.1 struktur organisasi pada Kantor Wali Nagari Muara Kiawai kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat dapat diuraikan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap unit kerja yaitu:

1. PJ. Wali Nagari

Pj. Wali nagari merupakan pejabat sementara yang ditunjuk untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat nagari (desa) ketika terjadi kekosongan jabatan wali nagari defenitif. Pj. Wali Nagari mempunyai wewenang dalam pengangkatan dan pemecatan perangkat nagari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN), serta penetapan peraturan nagari.

2. Kasi Pemerintahan

Kasi Pemerintahan (kepala seksi pemerintahan) adalah jabatan structural yang ada di tingkat kecamatan, kelurahan, atau nagari yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa (wali nagari). Kasi Pemerintahan memiliki tugas dalam penyelenggaraab

administrasi pemerintahan, pemberian layanan administrasi kepada masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap program pemerintahan nagari.

3. Kasi Pelayanan

Kasi pelayanan adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi berbagai layanan public yang diberikan oleh pemerintah, baik di tingkat kecamatan, desa, atau nagari. Kasi pelayanan memiliki tugas dan wewenang dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan menerbitkan dokumentasi administrasi.

4. Kasi Kesejahteraan

Kasi kesejahteraan adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk mengelola program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan social masyarakat terutama ditingkat desa atau nagari. Adapun wewenang dari kasi kesejahteraan yaitu, penetapan penerima bantuan social serta melakukan program social kepada masyarakat yang sepatutnya mendapatkan bantuan sosial.

5. Sekretaris Nagari

Sekretaris nagari adalah pejabat yang memiliki tugas dan wewenang penting dalam menjalankan administrasi pemerintahan di tingkat nagari. Sekretari nagari bertugas dalam membantu wali nagari menjalankan pemerintahan serta menyiapkan bahan untuk penyusunan peraturan nagari dan melakukan penyusunan laporan. Sekretaris nagari memiliki wewenang melakukan koordinasi dan pengelolaan administrasi nagari.

6. Kaur Keuangan

Kaur keuangan (kepala urusan keuangan) adalah jabatan dalam struktur organisasi pemerintahan desa atau nagari. Adapun tugas dan wewenang kaur keuangan dalam nagari yaitu Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), melaksanakan pengelolaan keuangan, menyiapkan pembayaran sesuai dengan anggaran yang telah disetujui serta menyusun laporan keuangan nagari.

7. Kaur Umum

Kaur umum adalah salah satu pejabat dalam struktur pemerintahan nagari yang memiliki tugas membantu wali nagari dalam menjalankan tugas administrasi ditingkat nagari, serta menyiapkan dan mengelola surat menyurat dan pengelolaan administrasi dan dokumen. Kaur umum juga memiliki wewenang dalam mengelola kegiatan yaitu mendokumentasikan dan menyimpan arsip.

8. Kaur Perencanaan

Kaur perencanaan merupakan salah satu pejabat dalam struktur pemerintahan nagari yang memiliki peran penting dalam merancang dan mengelola program serta kegiatan pembangunan di tingkat nagari. Adapun tugas dan wewenang kaur perencanaan yaitu menyusun rencana pembangunan nagari, mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan dan mengidentifikasi serta menganalisis kebutuhan pembangunan.

9. Kepala Jorong

Kepala jorong adalah pemimpin atau kepala unit administrasi terkecil di dalam pemerintahan nagari yang memiliki peran dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat ditingkat jorong. Kepala jorong ini nantinya bertugas untuk membantu pemerintahan nagari dalam melaksanakan tugas pemerintahan nagari dalam menyosialisasikan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam dan potensi alam, serta menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

